



IKHTISAR LHKPN a.n ABDUL WAHID NURKHOLIS
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2017)
NIK 3175100412870001

1. DATA PRIBADI

Nama : ABDUL WAHID NURKHOLIS
NIK : 3175100412870001
No KK : 3175041111151008
NPWP : 893579490009000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/4 Desember 1987
Status Nikah : Menikah
Agama : ISLAM
Alamat : JL. MUSHOLA HAQUL YAQIN GG.SWADAYA I NO.10A RT.008/02 BATUAMPAR KRAMATJATI JAKARTA TIMUR, KRAMAT JATI, KOTA
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
Nomor Handphone : 082122488161
Email : wabdul@jakartamrt.co.id
NHK : -
Bidang : BUMN/BUMD
Lembaga : PT MRT JAKARTA
Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN TRAIN OPERATION
Tanggal Laporan : 31 Desember 2017
Tanggal Kirim : 22 Mei 2018
Status : Perlu Perbaikan

2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	NUR RAHMAH HIDAYATI	ISTRI	JAKARTA , 5 September 1987 / PEREMPUAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	JL. MUSHOLA HAQUL YAQIN GG.SWADAYA I NO.10A RT.008/02 BATUAMPAR KRAMATJATI



NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
					JAKARTA TIMUR, Kelurahan BATUAMPAR, Kecamatan KRAMAT JATI, Kabupaten/Kota KOTA JAKARTA TIMUR , Provinsi DKI JAKARTA
2	NAWRAH NUR ZASKIA WAHID	ANAK TANGGUNGAN	JAKARTA , 22 Januari 2016 / PEREMPUAN	-	JL. MUSHOLA HAQUL YAQIN GG.SWADAYA I NO.10A RT.008/02 BATUAMPAR KRAMATJATI JAKARTA TIMUR, Kelurahan BATUAMPAR, Kecamatan KRAMAT JATI, Kabupaten/Kota KOTA JAKARTA TIMUR , Provinsi DKI JAKARTA

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA DEPARTEMEN TRAIN OPERATION	PT MRT JAKARTA	DIVISI RAILWAY OPERATION	DEPARTEMEN TRAIN OPERATION

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI	Rp. 0	Rp. 6.500.000	-



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Model : BEAT/NC11B3C Tahun Pembuatan : 2012 No. Pol. / Registrasi : B3126TNN	Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2017			
Sub Total				Rp. 6.500.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERTHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK MANDIRI	Nomor : 9000034872243 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 403.967	-
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : -	Nomor : 10820367106 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 34.190.623	-



NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Nama Bank / Lembaga : BANK DKI				
Sub Total				Rp. 34.594.590	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BRI	SK	Rp. 100.000.000	Rp. 70.000.000
Sub Total				Rp. 100.000.000	Rp. 70.000.000

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 111.032.000	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 111.032.000	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0



5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 77.455.800
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 2.775.800
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 0
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
	Sub Total	Rp. 80.231.600

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 30.800.400
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 30.800.400



7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 41.094.590	Rp. 70.000.000	Rp. -28.905.410

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.